

TRANSFORMASI PARTAI POLITIK DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA: DARI REPRESENTASI DEMOKRATIS MENUJU OLIGARKI KEKUASAAN

Iskandar Syukur

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

Email: issyukur@yahoo.com

ABSTRAK

Perkembangan sistem demokrasi di Indonesia pasca reformasi menunjukkan perubahan yang signifikan terhadap orientasi dan peran partai politik dalam sistem ketatanegaraan nasional. Partai politik yang pada awalnya diharapkan menjadi sarana representasi masyarakat dan penguatan demokrasi secara perlahan mengalami pergeseran orientasi menuju konsolidasi kekuasaan elite yang semakin dominan dalam berbagai proses politik. Kondisi tersebut ditandai dengan menguatnya pragmatisme politik, sentralisasi kekuasaan dalam internal partai, serta meningkatnya pengaruh kepentingan elite dan kekuatan modal terhadap arah kebijakan politik dan tata kelola pemerintahan. Penelitian ini bertujuan menganalisis transformasi partai politik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dari representasi demokratis menuju oligarki kekuasaan serta dampaknya terhadap demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui pengumpulan data dari berbagai sumber literatur, jurnal ilmiah, dokumen hukum, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan fokus penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menguatnya oligarki dalam partai politik telah menyebabkan menurunnya kualitas representasi politik masyarakat dan melemahnya fungsi demokrasi substantif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dominasi elite politik dan ketergantungan partai terhadap kekuatan modal turut memengaruhi proses pembentukan kebijakan publik, transparansi politik, serta independensi lembaga negara dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya. Oleh karena itu, rekonstruksi sistem kepartaian melalui penguatan demokrasi internal, reformasi kaderisasi politik, peningkatan transparansi partai, dan penguatan partisipasi masyarakat menjadi langkah penting dalam memperkuat demokrasi konstitusional dan mewujudkan sistem politik yang lebih responsif serta representatif di Indonesia.

Kata Kunci: Partai Politik, Oligarki Politik, Demokrasi Konstitusional, Ketatanegaraan Indonesia, Representasi Politik.

ABSTRACT

The development of the democratic system in Indonesia after the reform era has shown significant changes in the orientation and role of political parties in the national constitutional system. Initially intended to represent the people and strengthen democracy, political parties have gradually shifted their orientation toward the consolidation of elite power, which has become increasingly dominant in various political processes. This condition is characterized by the strengthening of political pragmatism, the centralization of power within parties, and the increasing influence of elite interests and capital forces on the direction of political policy and governance. This study aims to analyze the transformation of political parties in the Indonesian constitutional system from democratic representation to oligarchy of power and its impact on democracy and governance. This study uses a qualitative method with a descriptive approach through data collection from various literature sources, scientific journals, legal documents, and previous research relevant to the research focus. The results show that the strengthening of oligarchy within political parties has led to a decline in the quality of political representation of the people and a weakening of the substantive democratic function in the Indonesian constitutional system. The dominance of political elites and the dependence of parties on capital forces also influence the process of public policy formation, political transparency, and the independence of state institutions in carrying out their constitutional functions. Therefore, reconstructing the party system through strengthening internal democracy, reforming political cadres, increasing party transparency, and enhancing public participation are crucial steps in strengthening constitutional democracy and realizing a more responsive and representative political system in Indonesia.

Keywords: Political Parties, Political Oligarchy, Constitutional Democracy, Indonesian Constitution, Political Representation.

PENDAHULUAN

Perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi memperlihatkan perubahan politik yang sangat kompleks, terutama dalam posisi dan peran partai politik sebagai instrumen utama demokrasi. Reformasi 1998 pada awalnya menghadirkan optimisme besar terhadap lahirnya kehidupan politik yang lebih terbuka, partisipatif, dan bebas dari dominasi kekuasaan yang terpusat. Kejatuhan rezim otoritarian tidak hanya dipahami sebagai runtuhnya pemerintahan yang represif, tetapi juga sebagai momentum penting bagi restrukturisasi hubungan antara negara, masyarakat, dan kekuatan politik. Dalam situasi tersebut, partai politik memperoleh ruang yang sangat luas untuk berkembang sebagai sarana penyaluran aspirasi rakyat sekaligus mekanisme utama dalam pembentukan pemerintahan demokratis. Sistem multipartai yang lahir setelah reformasi dianggap sebagai simbol dari terbukanya kompetisi politik yang selama beberapa dekade mengalami pembatasan. Kehadiran banyak partai politik dipandang sebagai refleksi meningkatnya kebebasan politik masyarakat dan menguatnya semangat demokratisasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (Saputra et al., 2024).

Namun, perkembangan politik setelah reformasi tidak sepenuhnya berjalan sesuai dengan harapan awal demokratisasi. Di tengah meningkatnya kebebasan politik, muncul berbagai persoalan baru yang menunjukkan bahwa transformasi kelembagaan tidak selalu diikuti oleh transformasi budaya politik. Partai politik yang semula diharapkan menjadi sarana representasi publik secara perlahan mengalami perubahan orientasi yang semakin menjauh dari kepentingan masyarakat luas. Dinamika politik nasional memperlihatkan kecenderungan menguatnya kelompok elite tertentu dalam menentukan arah kebijakan partai, proses rekrutmen politik, hingga pembentukan koalisi kekuasaan. Dalam banyak situasi, keputusan-keputusan strategis partai lebih banyak ditentukan oleh kepentingan segelintir elite dibandingkan dengan aspirasi konstituen yang menjadi basis dukungannya. Fenomena ini

memperlihatkan bahwa demokrasi elektoral yang berkembang pasca reformasi belum sepenuhnya mampu menghasilkan demokrasi substantif yang memberikan ruang partisipasi politik secara merata (Erinaldi, 2024).

Perubahan orientasi partai politik semakin terlihat ketika kontestasi politik mulai didominasi oleh kepentingan pragmatis jangka pendek. Persaingan politik tidak lagi bertumpu pada perdebatan ideologis atau gagasan mengenai arah pembangunan negara, melainkan lebih banyak diarahkan pada perebutan akses kekuasaan dan distribusi sumber daya politik. Dalam kondisi tersebut, partai politik cenderung mengalami degradasi fungsi sebagai wadah perjuangan aspirasi masyarakat. Kehadiran partai politik dalam ruang publik sering kali lebih menonjol sebagai kendaraan kekuasaan dibandingkan sebagai institusi demokrasi yang memperjuangkan kepentingan rakyat. Akibatnya, relasi antara masyarakat dengan partai politik mengalami perubahan yang cukup signifikan. Tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik dalam berbagai momentum politik nasional menunjukkan kecenderungan yang fluktuatif dan sering kali berada pada tingkat yang rendah. Kondisi ini menjadi indikasi bahwa masyarakat mulai melihat adanya jarak yang semakin besar antara elite partai dengan kepentingan publik yang seharusnya mereka representasikan (Muthahhari & Sahrin, 2024).

Menguatnya dominasi elite dalam tubuh partai politik juga tidak dapat dilepaskan dari meningkatnya biaya politik dalam sistem demokrasi elektoral Indonesia. Pemilu yang berlangsung secara langsung membutuhkan sumber daya finansial yang sangat besar, baik dalam proses kampanye, konsolidasi politik, maupun mobilisasi dukungan masyarakat. Situasi tersebut menciptakan ketergantungan partai politik terhadap kelompok pemilik modal yang memiliki kemampuan finansial untuk mendukung aktivitas politik. Ketergantungan tersebut pada akhirnya memengaruhi independensi partai dalam menentukan kebijakan politik dan strategi kekuasaan. Dalam banyak kasus, hubungan antara elite politik dan kekuatan ekonomi

berkembang menjadi relasi yang saling menguntungkan, sehingga menghasilkan konsentrasi kekuasaan pada kelompok tertentu yang memiliki akses terhadap sumber daya politik dan ekonomi sekaligus. Fenomena ini memperlihatkan bahwa demokrasi tidak hanya dipengaruhi oleh mekanisme elektoral, tetapi juga oleh distribusi kekuatan ekonomi yang mampu menentukan arah kekuasaan politik (Bolqiah & Raffiudin, 2020).

Kecenderungan menguatnya oligarki dalam partai politik juga tampak dalam pola rekrutmen dan kaderisasi politik yang semakin tertutup. Kesempatan untuk menduduki posisi strategis dalam partai sering kali lebih ditentukan oleh kedekatan personal, hubungan keluarga, loyalitas terhadap elite tertentu, atau kemampuan finansial dibandingkan dengan kapasitas dan kompetensi kader. Situasi tersebut menyebabkan regenerasi politik berjalan secara tidak sehat dan mempersempit ruang partisipasi politik yang lebih inklusif. Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena politik dinasti semakin memperlihatkan bagaimana kekuasaan politik cenderung diwariskan dalam lingkaran keluarga atau kelompok tertentu. Kemunculan figur-figur politik yang memiliki hubungan kekerabatan dengan elite kekuasaan menunjukkan bahwa proses demokrasi sering kali tidak sepenuhnya berlangsung secara kompetitif dan terbuka. Kondisi ini tidak hanya memengaruhi kualitas partai politik, tetapi juga berdampak terhadap kualitas kepemimpinan nasional dan daerah (Wungu, 2022).

Pada sisi lain, transformasi partai politik menuju pola oligarkis turut memengaruhi kualitas sistem ketatanegaraan Indonesia secara keseluruhan. Dalam praktiknya, relasi antara lembaga negara dan partai politik menjadi sangat erat karena sebagian besar pejabat publik lahir dari proses politik kepartaian. Ketika partai politik dikuasai oleh elite tertentu, maka proses pengambilan keputusan dalam lembaga negara juga berpotensi dipengaruhi oleh kepentingan kelompok tersebut. Akibatnya, kebijakan publik sering kali tidak sepenuhnya diarahkan untuk kepentingan masyarakat luas, melainkan lebih mengakomodasi kepentingan politik dan

ekonomi elite tertentu. Situasi ini menimbulkan persoalan serius dalam penyelenggaraan pemerintahan demokratis karena negara berpotensi kehilangan independensinya dalam menjalankan fungsi pelayanan publik secara adil dan merata (Rohmah, 2024).

Perkembangan tersebut semakin terlihat dalam berbagai proses legislasi dan pembentukan kebijakan nasional yang sering kali memunculkan kontroversi di tengah masyarakat. Berbagai kebijakan strategis negara tidak jarang dipersepsikan lebih mencerminkan kepentingan elite politik dan ekonomi dibandingkan kepentingan masyarakat luas. Gelombang kritik publik terhadap sejumlah produk legislasi menunjukkan adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses politik yang berlangsung di tingkat elite. Dalam konteks ini, partai politik tidak lagi dipandang sebagai jembatan antara rakyat dan negara, tetapi justru sering dipersepsikan sebagai bagian dari struktur kekuasaan yang sulit dikontrol oleh masyarakat. Situasi tersebut memperlihatkan adanya krisis representasi dalam sistem demokrasi Indonesia, di mana mekanisme elektoral yang berlangsung secara rutin belum mampu menjamin hadirnya kebijakan publik yang benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat (Basarah & Hasanah, 2024).

Fenomena oligarki politik juga semakin menguat seiring berkembangnya personalisasi kekuasaan dalam partai politik. Banyak partai politik di Indonesia menunjukkan ketergantungan yang sangat besar terhadap figur tertentu, sehingga keberlangsungan partai sering kali ditentukan oleh dominasi tokoh sentral. Konsentrasi pengaruh pada figur tertentu menyebabkan proses pengambilan keputusan internal partai menjadi kurang demokratis dan cenderung tertutup. Dalam kondisi demikian, kritik internal sering kali sulit berkembang karena struktur partai dibangun berdasarkan loyalitas personal dibandingkan mekanisme organisasi yang sehat. Akibatnya, partai politik mengalami kesulitan dalam membangun sistem kaderisasi yang berkelanjutan dan mampu melahirkan pemimpin politik yang

kompeten serta independen (Nugroho & Hosnah, 2024).

Di tengah perkembangan demokrasi digital dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam ruang publik, tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas partai politik semakin besar. Masyarakat tidak lagi hanya menilai partai politik berdasarkan simbol ideologis atau identitas politik semata, tetapi juga berdasarkan kemampuan partai dalam menjaga integritas, memperjuangkan kepentingan publik, dan menjalankan proses politik secara terbuka. Akan tetapi, dalam praktiknya, banyak partai politik masih menghadapi persoalan serius terkait transparansi pendanaan, mekanisme pengambilan keputusan, hingga akuntabilitas kader yang menduduki jabatan publik. Berbagai kasus korupsi yang melibatkan elite partai politik semakin memperkuat persepsi publik mengenai adanya penyalahgunaan kekuasaan dalam sistem politik nasional. Situasi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan oligarki tidak hanya berkaitan dengan distribusi kekuasaan, tetapi juga menyangkut kualitas etika politik dan integritas kelembagaan (Boestam et al., 2023).

Selain itu, transformasi partai politik menuju oligarki kekuasaan juga menimbulkan dampak terhadap kualitas partisipasi politik masyarakat. Ketika masyarakat merasa bahwa proses politik hanya dikuasai oleh kelompok elite tertentu, maka tingkat partisipasi politik cenderung mengalami penurunan secara substantif. Meskipun partisipasi dalam pemilu secara formal tetap berlangsung, tetapi keterlibatan masyarakat dalam proses politik sering kali bersifat pasif dan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap arah kebijakan negara. Kondisi ini berpotensi melahirkan apatisisme politik, meningkatnya ketidakpercayaan terhadap institusi demokrasi, serta melemahnya legitimasi politik pemerintah. Dalam jangka panjang, situasi tersebut dapat menghambat konsolidasi demokrasi dan memperbesar jarak antara negara dengan masyarakat (As'ad et al., 2023).

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi partai politik

dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menunjukkan pergeseran dari fungsi representasi demokratis menuju kecenderungan oligarki kekuasaan, serta mengkaji bagaimana perubahan orientasi politik partai memengaruhi kualitas demokrasi, relasi kekuasaan, dan tata kelola pemerintahan nasional. Penelitian ini juga diarahkan untuk memahami dinamika konsolidasi kekuasaan elite dalam tubuh partai politik yang semakin memengaruhi proses distribusi kekuasaan negara, pembentukan kebijakan publik, serta hubungan antara masyarakat dan institusi politik dalam sistem demokrasi Indonesia yang terus berkembang di tengah perubahan politik yang semakin kompleks dan kompetitif.

TINJAUAN PUSTAKA

Partai Politik

Partai Politik (parpol) merupakan organisasi politik yang berfungsi sebagai wadah bagi masyarakat dalam menyalurkan berbagai aspirasi politiknya. Baik di negara berkembang maupun di negara maju, keberadaan parpol menjadi unsur yang sangat penting dalam suatu sistem politik. Aspirasi atau pandangan individu maupun kelompok dapat menjadi tidak berarti apabila tidak difasilitasi dan disalurkan dengan baik, sehingga keberagaman pendapat yang muncul di tengah masyarakat dapat diarahkan secara lebih tertib dan terstruktur (Susilawati, 2023).

Beragam pandangan dan sikap tersebut perlu diproses serta dirumuskan agar dapat disampaikan kepada pemerintah selaku pengambil keputusan dalam bentuk tuntutan maupun usulan kebijakan publik. Artikulasi kepentingan dari berbagai kelompok yang memiliki keterkaitan satu sama lain kemudian dipadukan menjadi suatu "penggabungan kepentingan" yang dalam sistem politik berperan sebagai input bagi pemerintah yang sedang berkuasa. Sebaliknya, apabila artikulasi tersebut tidak terhimpun secara baik, maka akan muncul persaingan kepentingan yang tidak terkendali dan berpotensi menimbulkan anarki. Dengan demikian, parpol memiliki tugas untuk menata kehendak umum yang bersifat tidak teratur. Partai-partai politik menciptakan keteraturan dari beragam

kepentingan para pemilih yang jumlahnya sangat besar tersebut (Sofianus et al., 2023).

Parpol dipahami sebagai suatu kelompok yang terorganisasi, di mana para anggotanya memiliki orientasi nilai dan cita-cita yang sejalan, dengan tujuan memperoleh kekuasaan serta merebut kedaulatan politik agar melalui kekuasaan tersebut mereka dapat menjalankan kebijakan-kebijakan yang diinginkan. Pandangan lain dikemukakan oleh Thomas H. Stevenson yang menyatakan bahwa partai politik merupakan kelompok terorganisir yang bertujuan mengawasi jalannya pemerintahan dalam melaksanakan program-programnya sekaligus menempatkan anggota-anggotanya dalam jabatan-jabatan pemerintahan. Oleh sebab itu, selain berfungsi mengontrol pelaksanaan pemerintahan agar tetap sesuai dengan program partai, parpol juga berupaya menempatkan kader-kadernya ke dalam struktur birokrasi pemerintahan (Basuki, 2020).

Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan hasil dari proses panjang yang berlangsung sejak Proklamasi Kemerdekaan hingga saat ini dan terus mengalami perkembangan seiring perubahan zaman. Sebagai negara hukum dan demokrasi, Indonesia mengatur struktur serta fungsi lembaga-lembaga negara melalui konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Dalam kajian ketatanegaraan, sistem tersebut mencerminkan prinsip constitutional democracy dan rule of law, di mana pelaksanaan kekuasaan negara dibatasi oleh hukum serta dijalankan berdasarkan kehendak rakyat (Fajri, 2023).

Secara teoritis, Indonesia menganut konsep Negara Hukum (Rechtsstaat) yang dikembangkan oleh Montesquieu, John Locke, Hans Kelsen, dan Friedrich Julius Stahl. Sementara itu, tokoh Indonesia yang banyak membahas konsep tersebut antara lain Soepomo, Hazairin, Mohammad Yamin, dan Miriam Budiardjo. Konsep Negara Hukum (Rechtsstaat) menempatkan supremasi hukum sebagai dasar utama dalam penyelenggaraan negara, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa

Negara Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan tersebut mengandung arti bahwa seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada hukum, serta hukum memiliki posisi tertinggi dalam sistem pemerintahan dan kehidupan masyarakat Indonesia (Rais, 2022).

Selain itu, Indonesia juga menerapkan teori Pemisahan Kekuasaan (Trias Politica) yang dipelopori oleh Montesquieu. Dalam teori tersebut, kekuasaan negara dibagi menjadi tiga bagian, yaitu kekuasaan legislatif sebagai lembaga pembentuk undang-undang yang di Indonesia dijalankan oleh DPR dan DPD, kekuasaan eksekutif sebagai pelaksana undang-undang yang dijalankan oleh Presiden, Wakil Presiden, para menteri, beserta jajarannya, serta kekuasaan yudikatif sebagai lembaga peradilan yang bertugas mengadili pelanggaran terhadap undang-undang yang di Indonesia dijalankan oleh MA, MK, dan KY. Namun demikian, penerapan Pemisahan Kekuasaan (Trias Politica) di Indonesia tidak dilakukan secara mutlak, melainkan melalui pembagian kekuasaan secara fungsional. Pengaturan tersebut dimaksudkan agar tidak ada satu lembaga pun yang memiliki kekuasaan terlalu dominan dibandingkan lembaga lainnya. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, kedudukan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berada pada posisi sejajar, sehingga tidak terdapat lembaga yang lebih tinggi satu sama lain dan keduanya tidak dapat saling menjatuhkan. DPR tidak mempunyai kewenangan untuk membubarkan Presiden, begitu pula Presiden tidak dapat membubarkan DPR (Wutsqah & Erham, 2024).

Teori berikutnya adalah teori kedaulatan rakyat, yaitu teori politik yang menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berada di tangan rakyat, sedangkan pemerintah menjalankan kekuasaan tersebut berdasarkan kehendak rakyat. Tokoh-tokoh penting dalam teori ini antara lain John Locke, Montesquieu, dan Jean-Jacques Rousseau, yang pemikirannya muncul sebagai reaksi terhadap teori kedaulatan raja yang melahirkan absolutisme. Teori kedaulatan rakyat kemudian menjadi landasan bagi negara demokrasi, termasuk Indonesia, yang

menekankan pentingnya keterlibatan rakyat melalui mekanisme pemilihan umum dan sistem perwakilan (Sulistiono & Boediningsih, 2023).

Selain teori-teori yang telah dijelaskan sebelumnya, Indonesia juga menerapkan konsep negara kesejahteraan atau welfare state. Tokoh yang menggagas teori Negara Kesejahteraan (Welfare State), yaitu R. Kranenburg, menyatakan bahwa negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan masyarakat serta bertindak adil agar kesejahteraan tersebut dapat dirasakan secara merata dan seimbang oleh seluruh rakyat, bukan hanya kelompok tertentu. Secara sederhana, konsep welfare state dapat dipahami sebagai suatu sistem di mana pemerintah memegang peranan penting dalam menjamin kesejahteraan setiap warga negara. Karakteristik utama konsep Welfare State ditandai dengan adanya program asuransi sosial dan berbagai program jaminan kesejahteraan bagi masyarakat. Bentuk penerapannya di Indonesia dapat dilihat melalui program BPJS dan berbagai bantuan sosial lainnya (Hasan, 2024).

Sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan perpaduan antara teori-teori ketatanegaraan klasik dengan nilai-nilai lokal yang bersumber dari Pancasila. Dengan berlandaskan negara hukum dan demokrasi konstitusional, Indonesia berupaya mewujudkan pemerintahan yang adil, transparan, serta berpihak kepada kepentingan rakyat. Struktur ketatanegaraan Indonesia sendiri merupakan hasil dari proses historis dan perkembangan konstitusional yang panjang serta kompleks. Melalui landasan teori ketatanegaraan dan nilai-nilai Pancasila, Indonesia berusaha membangun negara hukum yang demokratis dan berkeadilan. Reformasi konstitusi telah membawa perubahan yang cukup signifikan, meskipun berbagai tantangan masih tetap dihadapi dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang ideal (Suryatni, 2024).

Oligarki Kekuasaan

Oligarki (*Oligarch*) merupakan pihak yang menguasai serta mengendalikan konsentrasi besar sumber daya material yang digunakan untuk mempertahankan

maupun meningkatkan kekayaan pribadi dan posisi sosial eksklusif yang dimilikinya. Sumber daya tersebut harus dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, meskipun tidak selalu berada dalam kepemilikan langsung mereka. Terdapat tiga unsur yang saling berkaitan dalam konsep ini. Pertama, kekayaan merupakan bentuk kekuasaan material yang berbeda dari sumber kekuasaan lainnya dan dapat terkonsentrasi pada kelompok minoritas. Kedua, oligarki selalu merujuk pada individu-individu tertentu. Ketiga, definisi oligarki bersifat tetap dan memiliki perbedaan dengan konsep elit (Sugeng, 2023).

Teori Oligarki Kekuasaan merupakan konsep dalam ilmu politik dan sosiologi yang menjelaskan bahwa kekuasaan dalam suatu masyarakat atau organisasi cenderung terpusat pada sekelompok kecil individu atau elit. Robert Michels, seorang sosiolog asal Jerman, berpendapat bahwa setiap organisasi, termasuk partai politik yang demokratis sekalipun, pada akhirnya akan berkembang menuju bentuk oligarki. Michels menjelaskan bahwa struktur organisasi yang semakin kompleks membutuhkan spesialisasi dan sistem manajemen yang efisien. Kondisi tersebut mendorong adanya delegasi kekuasaan kepada pejabat atau kelompok kecil tertentu yang kemudian mengonsolidasikan kekuasaan serta mengendalikan organisasi secara keseluruhan (Fadilah & Sejati, 2024).

Menurut Michels, seluruh bentuk organisasi, tanpa memandang seberapa demokratis organisasi tersebut pada awal pembentukannya, akan cenderung bergerak ke arah oligarkis. Hal ini berarti bahwa kekuasaan dan pengambilan keputusan penting akan dikuasai oleh sekelompok kecil orang, sedangkan partisipasi anggota secara luas menjadi semakin terbatas. Peningkatan birokratisasi dalam organisasi juga memperkuat kecenderungan oligarki karena menjadikan struktur kekuasaan lebih kaku dan sulit diubah. Para pejabat yang telah memiliki kekuasaan memperoleh keuntungan dari kondisi tersebut untuk mempertahankan sekaligus memperkuat posisi mereka. Selain itu, Michels juga menyatakan bahwa upaya untuk menggulingkan oligarki sering kali justru

berakhir dengan munculnya oligarki baru. Hal tersebut terjadi karena struktur organisasi dan kebutuhan terhadap kepemimpinan yang efektif secara alami akan melahirkan kelompok elit baru (Budi, 2024).

METODE

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam dinamika transformasi partai politik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya terkait pergeseran fungsi partai politik dari representasi demokratis menuju kecenderungan oligarki kekuasaan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya berfokus pada pengamatan terhadap fenomena politik secara normatif, tetapi juga berupaya mengkaji berbagai realitas politik yang berkembang dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, termasuk menguatnya dominasi elite partai, perubahan orientasi kekuasaan politik, serta dampaknya terhadap kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini memanfaatkan berbagai sumber data yang memiliki relevansi dengan fokus pembahasan, baik yang berasal dari jurnal ilmiah, buku akademik, dokumen peraturan perundang-undangan, maupun hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan sistem kepartaian, demokrasi, dan oligarki politik di Indonesia. Melalui penggunaan pendekatan kualitatif, penelitian ini diarahkan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perkembangan partai politik dalam dinamika politik nasional yang semakin kompleks dan kompetitif. Data-data penelitian yang telah berhasil dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif dengan menyesuaikan keterkaitannya terhadap fokus penelitian, sehingga mampu menghasilkan pembahasan yang sistematis mengenai pola transformasi partai politik serta implikasinya terhadap sistem demokrasi dan ketatanegaraan Indonesia. Proses analisis dilakukan dengan menelaah berbagai fenomena politik yang menunjukkan kecenderungan konsolidasi kekuasaan elite dalam partai politik,

hubungan antara kekuatan politik dan kepentingan kekuasaan, serta pengaruhnya terhadap representasi masyarakat dalam sistem demokrasi nasional. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai tantangan demokrasi Indonesia di tengah berkembangnya pola kekuasaan politik yang semakin terpusat pada kelompok elite tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pergeseran Orientasi Partai Politik dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia

Perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia setelah reformasi memperlihatkan perubahan yang sangat signifikan terhadap orientasi dan pola gerak partai politik dalam kehidupan demokrasi nasional. Pada fase awal reformasi, partai politik tampil sebagai simbol harapan masyarakat terhadap lahirnya sistem politik yang lebih terbuka, partisipatif, dan mampu mengoreksi berbagai praktik kekuasaan yang sebelumnya berlangsung secara sentralistik. Kehadiran partai politik pada masa tersebut tidak hanya dipandang sebagai instrumen elektoral semata, tetapi juga sebagai sarana perjuangan aspirasi masyarakat dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih demokratis. Partai politik menjadi ruang artikulasi berbagai kepentingan sosial yang selama masa sebelumnya mengalami pembatasan dalam ruang politik nasional. Dalam konteks tersebut, kehidupan kepartaian di Indonesia sempat menunjukkan gairah demokrasi yang sangat kuat melalui munculnya berbagai kekuatan politik baru yang membawa semangat perubahan, reformasi kelembagaan, dan penguatan partisipasi masyarakat dalam sistem ketatanegaraan.

Namun, perkembangan politik nasional dalam dua dekade terakhir menunjukkan adanya perubahan orientasi yang cukup mendasar dalam tubuh partai politik. Perubahan tersebut terlihat dari semakin kuatnya kecenderungan partai politik untuk menjadikan kekuasaan sebagai tujuan utama dibandingkan memperjuangkan kepentingan publik secara substantif. Dalam praktik politik yang berkembang, keberhasilan partai sering kali lebih diukur

berdasarkan kemampuan memperoleh kursi kekuasaan, menguasai jabatan strategis pemerintahan, serta mempertahankan pengaruh politik dalam lingkaran elite negara. Situasi ini menyebabkan arah perjuangan partai politik mengalami pergeseran yang cukup jauh dari semangat awal reformasi yang menempatkan masyarakat sebagai pusat orientasi politik. Partai politik tidak lagi sepenuhnya hadir sebagai institusi yang membangun hubungan ideologis dengan masyarakat, melainkan lebih banyak bergerak sebagai organisasi politik yang berorientasi pada konsolidasi kekuasaan dan kepentingan elektoral jangka pendek.

Perubahan orientasi tersebut terlihat jelas dalam berbagai dinamika politik nasional, terutama dalam proses pembentukan koalisi politik yang semakin pragmatis dan cair. Dalam banyak momentum politik, perbedaan posisi politik antarpolitical tidak lagi dibangun berdasarkan arah perjuangan yang konsisten atau visi kebangsaan yang jelas, tetapi lebih ditentukan oleh kepentingan kekuasaan yang bersifat situasional. Koalisi politik dapat berubah dalam waktu singkat sesuai dengan kebutuhan distribusi kekuasaan dan kepentingan elite politik tertentu. Situasi ini memperlihatkan bahwa orientasi partai politik dalam sistem demokrasi Indonesia semakin menjauh dari pola perjuangan politik yang berbasis prinsip dan konsistensi. Pergeseran tersebut tidak hanya memengaruhi kualitas kompetisi demokrasi, tetapi juga menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan dalam membedakan karakter politik antarpolitical karena hampir seluruh kekuatan politik bergerak dalam pola kepentingan yang relatif serupa (Cahyono et al., 2024).

Kondisi tersebut turut berdampak terhadap melemahnya identitas politik partai dalam ruang demokrasi nasional. Banyak partai politik tidak lagi menunjukkan konsistensi arah perjuangan yang jelas dalam berbagai isu strategis kebangsaan. Pergantian posisi politik yang terlalu cepat dalam menghadapi dinamika kekuasaan sering kali memperlihatkan bahwa orientasi partai lebih ditentukan oleh peluang politik dibandingkan komitmen terhadap agenda perjuangan tertentu.

Akibatnya, masyarakat semakin sulit menemukan pembeda yang substantif antara satu partai dengan partai lainnya. Dalam berbagai kontestasi politik, persaingan antarpolitical lebih banyak menampilkan pertarungan figur, strategi pencitraan, dan mobilisasi kekuatan elektoral dibandingkan pertarungan gagasan mengenai arah pembangunan negara. Fenomena ini memperlihatkan adanya penurunan kualitas demokrasi deliberatif karena ruang perdebatan publik yang seharusnya diisi oleh pertukaran gagasan politik justru tergantikan oleh kompetisi pragmatis yang berorientasi pada kemenangan elektoral semata.

Melemahnya identitas politik partai juga dipengaruhi oleh semakin dominannya politik personalisasi dalam sistem kepartaian Indonesia. Banyak partai politik berkembang dengan ketergantungan yang sangat besar terhadap figur tertentu yang memiliki pengaruh kuat dalam struktur kekuasaan partai. Dominasi figur sentral menyebabkan arah politik partai sering kali berubah mengikuti kepentingan dan strategi elite tertentu, bukan berdasarkan mekanisme organisasi yang demokratis. Dalam kondisi demikian, loyalitas terhadap tokoh politik lebih diutamakan dibandingkan konsistensi terhadap nilai perjuangan partai. Akibatnya, struktur partai menjadi rentan mengalami konflik internal, fragmentasi politik, hingga perpindahan elite secara oportunistik ketika terjadi perubahan konfigurasi kekuasaan nasional. Situasi tersebut menunjukkan bahwa kelembagaan partai politik belum sepenuhnya berkembang secara matang sebagai institusi demokrasi yang stabil dan independen.

Selain itu, meningkatnya pragmatisme politik dalam kehidupan kepartaian Indonesia turut memperlihatkan bagaimana kekuasaan menjadi orientasi utama dalam aktivitas politik partai. Praktik pragmatisme terlihat dari kecenderungan partai politik untuk menyesuaikan posisi dan sikap politiknya berdasarkan peluang memperoleh akses kekuasaan. Dalam banyak situasi, partai politik yang sebelumnya berada pada posisi oposisi dapat dengan cepat bergabung ke dalam pemerintahan ketika tersedia ruang

kompromi politik yang menguntungkan. Sebaliknya, dukungan terhadap pemerintahan juga dapat berubah sewaktu-waktu ketika terjadi konflik kepentingan di tingkat elite. Pola hubungan politik seperti ini memperlihatkan bahwa prinsip checks and balances dalam sistem demokrasi sering kali tidak berjalan secara optimal karena oposisi politik tidak dibangun berdasarkan pengawasan substantif terhadap kekuasaan, melainkan lebih dipengaruhi oleh negosiasi kepentingan politik jangka pendek.

Pragmatisme politik yang semakin menguat juga berdampak terhadap kualitas kebijakan publik yang dihasilkan dalam sistem pemerintahan. Ketika orientasi partai lebih berfokus pada konsolidasi kekuasaan, maka pembentukan kebijakan negara sering kali dipengaruhi oleh kompromi elite politik dibandingkan kebutuhan masyarakat secara luas. Dalam berbagai proses legislasi nasional, publik sering melihat adanya dominasi kepentingan politik tertentu yang lebih mengutamakan stabilitas kekuasaan dibandingkan aspirasi masyarakat. Kondisi ini menimbulkan persepsi bahwa partai politik tidak lagi sepenuhnya menjalankan fungsi representasi publik secara efektif, melainkan menjadi bagian dari struktur kekuasaan yang lebih tertutup dan sulit dikontrol oleh masyarakat. Akibatnya, hubungan antara masyarakat dengan partai politik mengalami penurunan kualitas yang cukup serius dalam ruang demokrasi Indonesia.

Dominasi kepentingan elektoral dalam aktivitas partai politik semakin memperkuat perubahan orientasi tersebut. Dalam sistem demokrasi yang semakin kompetitif, partai politik cenderung memusatkan energi politiknya pada upaya memenangkan pemilu dibandingkan memperkuat fungsi pendidikan politik atau pengembangan kaderisasi jangka panjang. Aktivitas partai lebih banyak diarahkan pada strategi pencitraan publik, mobilisasi dukungan politik, dan pembangunan popularitas elite dibandingkan penguatan program perjuangan yang substantif. Situasi ini menyebabkan aktivitas politik partai menjadi sangat bergantung pada momentum elektoral. Ketika pemilu berlangsung, partai politik tampil sangat aktif dalam membangun komunikasi dengan

masyarakat. Akan tetapi, setelah proses elektoral selesai, hubungan tersebut sering kali mengalami penurunan intensitas secara signifikan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa relasi antara partai politik dan masyarakat semakin bersifat transaksional dan temporer.

Dalam konteks tersebut, masyarakat tidak lagi ditempatkan sebagai subjek utama dalam proses politik, tetapi sering kali diposisikan sebagai basis dukungan elektoral yang dibutuhkan untuk memenangkan kontestasi kekuasaan. Pendekatan politik yang terlalu berorientasi pada elektoral menyebabkan berbagai persoalan masyarakat sering kali hanya mendapatkan perhatian ketika memiliki nilai strategis dalam perolehan suara politik. Akibatnya, banyak kebijakan politik lebih diarahkan untuk kepentingan popularitas jangka pendek dibandingkan penyelesaian persoalan struktural yang dihadapi masyarakat. Fenomena ini menunjukkan bahwa demokrasi elektoral yang berkembang di Indonesia masih menghadapi persoalan serius dalam membangun hubungan politik yang substantif antara partai politik dan masyarakat.

Perubahan hubungan antara partai politik dan masyarakat juga dipengaruhi oleh berkembangnya pola komunikasi politik yang semakin bersifat simbolik dan digitalistik. Dalam beberapa tahun terakhir, aktivitas politik partai lebih banyak dilakukan melalui pencitraan media, kampanye digital, dan pengelolaan opini publik dibandingkan penguatan hubungan organisasi secara langsung dengan masyarakat. Meskipun perkembangan teknologi informasi memberikan ruang partisipasi politik yang lebih luas, tetapi pada saat yang sama juga menciptakan politik yang lebih dangkal dan berorientasi pada popularitas sesaat. Partai politik sering kali lebih fokus membangun citra publik dibandingkan memperkuat kualitas komunikasi politik yang substantif dengan masyarakat. Akibatnya, ruang demokrasi mengalami perubahan menjadi arena persaingan opini yang sangat dipengaruhi oleh kekuatan media dan kemampuan mobilisasi informasi.

Kondisi tersebut pada akhirnya memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik dalam sistem demokrasi Indonesia. Berbagai survei politik dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa partai politik termasuk institusi yang memiliki tingkat kepercayaan publik relatif rendah dibandingkan lembaga lainnya. Rendahnya kepercayaan tersebut tidak dapat dilepaskan dari persepsi masyarakat mengenai kuatnya kepentingan elite dalam aktivitas politik partai, lemahnya konsistensi perjuangan politik, serta maraknya praktik korupsi yang melibatkan kader partai politik di berbagai tingkatan pemerintahan. Ketika masyarakat melihat bahwa partai politik lebih banyak memperjuangkan kepentingan kekuasaan dibandingkan kepentingan publik, maka legitimasi sosial partai dalam sistem demokrasi secara perlahan mengalami penurunan.

Dalam jangka panjang, pergeseran orientasi partai politik tersebut berpotensi menimbulkan persoalan serius terhadap konsolidasi demokrasi dan stabilitas ketatanegaraan Indonesia. Demokrasi tidak hanya membutuhkan prosedur pemilu yang berjalan secara rutin, tetapi juga memerlukan partai politik yang mampu menjaga integritas, konsistensi perjuangan, dan kedekatan dengan masyarakat. Ketika partai politik semakin terjebak dalam orientasi kekuasaan yang pragmatis, maka demokrasi berisiko kehilangan substansi representatifnya. Oleh karena itu, dinamika perubahan orientasi partai politik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menjadi persoalan penting yang perlu terus dikaji secara mendalam, terutama dalam memahami bagaimana relasi antara kekuasaan politik, kepentingan elite, dan kualitas demokrasi berkembang di tengah perubahan politik nasional yang semakin kompleks.

Konsolidasi Elite dan Penguatan Oligarki dalam Internal Partai Politik

Perkembangan partai politik dalam sistem demokrasi Indonesia pasca reformasi menunjukkan adanya perubahan yang cukup signifikan dalam pola distribusi kekuasaan di internal organisasi politik. Pada fase awal reformasi, partai politik

dipandang sebagai ruang terbuka yang memungkinkan terjadinya partisipasi politik secara lebih luas, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mekanisme regenerasi kepemimpinan politik. Keterbukaan politik yang lahir setelah runtuhnya rezim otoritarian sempat menghadirkan optimisme terhadap terbentuknya struktur partai yang lebih demokratis, kolektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat. Akan tetapi, perkembangan politik nasional dalam beberapa dekade terakhir justru memperlihatkan kecenderungan yang berbeda. Struktur partai politik secara perlahan mengalami konsolidasi kekuasaan yang semakin terpusat pada kelompok elite tertentu, sehingga ruang partisipasi internal menjadi semakin terbatas. Dalam kondisi tersebut, pengambilan keputusan politik tidak lagi sepenuhnya berlangsung secara kolektif melalui mekanisme organisasi yang terbuka, tetapi lebih banyak dikendalikan oleh elite yang memiliki pengaruh dominan dalam struktur partai.

Sentralisasi pengambilan keputusan menjadi salah satu ciri utama menguatnya oligarki dalam internal partai politik Indonesia. Dalam banyak partai, keputusan strategis yang berkaitan dengan arah politik, penentuan kandidat, pembentukan koalisi, hingga distribusi jabatan politik lebih banyak ditentukan oleh lingkaran elite tertentu dibandingkan melalui mekanisme musyawarah yang partisipatif. Struktur organisasi partai sering kali hanya berfungsi sebagai formalitas administratif, sementara keputusan substantif telah ditentukan oleh kelompok kecil yang memiliki kontrol kuat terhadap sumber daya politik partai. Situasi ini memperlihatkan bahwa demokrasi internal partai belum berkembang secara optimal, meskipun secara formal partai politik berada dalam sistem demokrasi yang terbuka. Akibatnya, kader partai yang berada di luar lingkaran elite sering kali memiliki keterbatasan dalam memengaruhi arah kebijakan partai ataupun dalam memperoleh kesempatan politik yang setara.

Konsentrasi kekuasaan pada elite tertentu semakin terlihat dalam pola kepemimpinan partai yang cenderung bersifat personalistik. Banyak partai politik

di Indonesia menunjukkan ketergantungan yang sangat besar terhadap figur sentral yang memiliki pengaruh dominan dalam menjaga stabilitas organisasi dan menentukan arah politik partai. Dalam praktiknya, figur tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin administratif, tetapi juga menjadi pusat legitimasi politik partai secara keseluruhan. Dominasi tokoh tertentu menyebabkan proses pengambilan keputusan menjadi sangat terpusat dan bergantung pada kehendak elite utama partai. Kondisi ini menciptakan struktur kekuasaan yang hierarkis dan mempersempit ruang kritik internal. Loyalitas terhadap elite partai sering kali menjadi faktor yang lebih menentukan dibandingkan kapasitas, integritas, atau kemampuan kader dalam proses distribusi posisi politik di internal organisasi (Elviandri et al., 2024).

Pengaruh elite politik dalam menentukan arah kebijakan partai juga terlihat dalam berbagai momentum politik nasional, terutama ketika partai harus menentukan posisi strategis terhadap pemerintahan maupun oposisi. Dalam banyak kasus, keputusan politik partai tidak selalu mencerminkan aspirasi kader di tingkat bawah atau kepentingan konstituen secara luas, melainkan lebih dipengaruhi oleh kepentingan elite yang memiliki akses terhadap kekuasaan negara. Situasi tersebut menyebabkan arah perjuangan partai sering kali berubah secara cepat sesuai dengan dinamika kepentingan politik di tingkat elite nasional. Perubahan sikap politik yang terlalu fleksibel memperlihatkan bahwa orientasi partai lebih diarahkan pada upaya menjaga posisi dalam konfigurasi kekuasaan dibandingkan mempertahankan konsistensi perjuangan politik. Dalam konteks ini, partai politik mengalami transformasi menjadi instrumen konsolidasi kekuasaan elite yang semakin sulit dipisahkan dari kepentingan pragmatis jangka pendek.

Selain memengaruhi arah kebijakan partai, dominasi elite juga berdampak terhadap pola hubungan internal organisasi politik. Struktur partai menjadi semakin tertutup karena akses terhadap proses pengambilan keputusan hanya dimiliki oleh kelompok tertentu yang berada dekat dengan pusat kekuasaan partai. Kader di

tingkat daerah atau kader yang tidak memiliki kedekatan dengan elite pusat sering kali mengalami keterbatasan dalam memperoleh ruang politik yang strategis. Kondisi ini menyebabkan munculnya kesenjangan kekuasaan yang cukup tajam di internal partai politik. Di satu sisi, elite partai memiliki kontrol besar terhadap sumber daya organisasi dan akses politik nasional, sementara di sisi lain sebagian besar kader hanya berfungsi sebagai mesin mobilisasi politik dalam momentum elektoral tanpa memiliki pengaruh signifikan terhadap arah kebijakan partai.

Menguatnya oligarki dalam internal partai politik juga berkaitan erat dengan berkembangnya politik dinasti dan jaringan kekuasaan keluarga dalam struktur kepartaian Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena politik dinasti semakin terlihat dalam proses distribusi jabatan politik, baik di tingkat nasional maupun daerah. Posisi strategis dalam partai maupun pencalonan dalam pemilu sering kali melibatkan individu yang memiliki hubungan kekerabatan dengan elite politik tertentu. Situasi tersebut memperlihatkan bahwa akses terhadap kekuasaan politik tidak sepenuhnya terbuka secara kompetitif, melainkan cenderung diwariskan melalui jaringan keluarga dan relasi personal yang telah memiliki pengaruh kuat dalam struktur politik nasional. Akibatnya, proses demokrasi internal partai menjadi semakin eksklusif dan sulit memberikan kesempatan yang setara bagi kader-kader baru yang tidak memiliki kedekatan dengan elite kekuasaan.

Fenomena politik dinasti tidak hanya memperkuat konsentrasi kekuasaan dalam kelompok tertentu, tetapi juga memperlihatkan bagaimana partai politik semakin dipengaruhi oleh relasi personal dibandingkan mekanisme organisasi yang profesional. Dalam banyak situasi, loyalitas keluarga atau hubungan kekerabatan memiliki posisi yang lebih penting dibandingkan kapasitas kader dalam menentukan distribusi kekuasaan politik. Kondisi tersebut mempersempit ruang kompetisi yang sehat di internal partai dan berpotensi melahirkan kepemimpinan politik yang kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ketika proses

regenerasi politik lebih ditentukan oleh kedekatan dengan elite atau hubungan keluarga, maka partai politik akan mengalami kesulitan dalam membangun sistem kaderisasi yang berbasis merit dan kompetensi.

Pada sisi lain, menguatnya oligarki dalam partai politik juga tidak dapat dipisahkan dari meningkatnya ketergantungan partai terhadap kekuatan modal dan sumber daya ekonomi. Sistem demokrasi elektoral yang membutuhkan biaya politik sangat besar menyebabkan partai politik semakin bergantung pada dukungan finansial dari kelompok tertentu yang memiliki kekuatan ekonomi. Ketergantungan tersebut memengaruhi independensi partai dalam menentukan kebijakan politik dan arah perjuangan organisasi. Dalam banyak kasus, elite ekonomi yang memiliki kontribusi besar terhadap pembiayaan politik memperoleh akses yang kuat terhadap proses pengambilan keputusan partai. Situasi ini menciptakan hubungan saling menguntungkan antara elite politik dan elite ekonomi, sehingga struktur partai politik semakin dikuasai oleh kelompok yang memiliki kombinasi kekuatan modal dan kekuasaan politik sekaligus.

Dominasi kekuatan modal dalam partai politik turut memengaruhi proses pencalonan politik dalam berbagai kontestasi elektoral. Kandidat yang memiliki kemampuan finansial besar sering kali memiliki peluang lebih tinggi untuk memperoleh dukungan partai dibandingkan kader yang memiliki kapasitas politik tetapi tidak memiliki sumber daya ekonomi memadai. Kondisi ini menyebabkan kompetisi politik menjadi tidak sepenuhnya didasarkan pada kualitas kepemimpinan atau kemampuan representasi publik, melainkan sangat dipengaruhi oleh kemampuan finansial dalam mendukung aktivitas politik partai. Akibatnya, partai politik semakin bergerak dalam logika politik transaksional yang menempatkan sumber daya ekonomi sebagai faktor utama dalam distribusi kekuasaan internal.

Ketergantungan terhadap modal politik juga berdampak terhadap arah kebijakan publik yang dihasilkan oleh elite partai ketika telah memperoleh kekuasaan negara.

Relasi yang kuat antara partai politik dan kelompok pemilik modal sering kali memunculkan persepsi bahwa kebijakan negara lebih banyak mengakomodasi kepentingan elite ekonomi dibandingkan kepentingan masyarakat luas. Situasi tersebut memperlihatkan bahwa oligarki politik tidak hanya berkembang dalam struktur internal partai, tetapi juga memengaruhi tata kelola pemerintahan secara lebih luas. Ketika partai politik menjadi bagian dari jaringan kekuasaan ekonomi dan politik yang saling terhubung, maka demokrasi berisiko kehilangan fungsi representatifnya karena proses pengambilan kebijakan lebih banyak dikendalikan oleh kelompok elite tertentu.

Kondisi tersebut pada akhirnya berdampak terhadap terbatasnya ruang kaderisasi dan regenerasi politik yang kompetitif dalam tubuh partai politik. Banyak partai mengalami kesulitan dalam membangun sistem kaderisasi yang terbuka dan berbasis kemampuan karena proses distribusi kekuasaan lebih banyak dipengaruhi oleh loyalitas politik, kedekatan personal, dan kemampuan finansial. Kader muda atau individu yang memiliki kapasitas intelektual dan integritas sering kali menghadapi hambatan untuk berkembang ketika tidak memiliki akses terhadap jaringan elite partai. Situasi ini menyebabkan regenerasi kepemimpinan politik berjalan secara stagnan dan cenderung didominasi oleh kelompok yang sama dalam waktu yang panjang.

Terbatasnya kaderisasi politik yang sehat juga berdampak terhadap kualitas demokrasi nasional secara keseluruhan. Partai politik yang seharusnya menjadi ruang pembentukan pemimpin publik justru mengalami kecenderungan tertutup dan eksklusif. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat menghambat lahirnya kepemimpinan politik yang inovatif, responsif, dan memiliki orientasi kuat terhadap kepentingan masyarakat. Ketika partai politik lebih banyak dikendalikan oleh oligarki internal yang berorientasi pada pelestarian kekuasaan, maka demokrasi akan menghadapi persoalan serius terkait representasi politik dan distribusi kekuasaan yang adil.

Dampak Oligarki Partai Politik terhadap Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Perkembangan demokrasi Indonesia pasca reformasi pada awalnya memperlihatkan optimisme yang besar terhadap terbentuknya sistem politik yang lebih terbuka, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Reformasi politik telah menghadirkan perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan melalui perluasan kebebasan politik, penguatan mekanisme elektoral, serta meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam proses politik nasional. Dalam konteks tersebut, partai politik memperoleh posisi yang sangat strategis sebagai penghubung utama antara negara dan masyarakat. Akan tetapi, dinamika politik yang berkembang dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan bahwa demokrasi prosedural yang berjalan secara formal tidak selalu menghasilkan demokrasi substantif yang benar-benar mencerminkan kepentingan publik. Menguatnya oligarki dalam struktur partai politik telah memunculkan berbagai persoalan serius yang memengaruhi kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan di Indonesia. Konsentrasi kekuasaan pada kelompok elite tertentu menyebabkan proses politik semakin menjauh dari prinsip representasi publik yang menjadi fondasi utama dalam sistem demokrasi.

Salah satu dampak paling nyata dari menguatnya oligarki partai politik adalah menurunnya kualitas representasi politik masyarakat dalam sistem demokrasi nasional. Dalam praktik politik yang berkembang, partai politik tidak lagi sepenuhnya menjalankan fungsi sebagai penyalur aspirasi masyarakat secara efektif, melainkan lebih banyak bergerak sebagai instrumen konsolidasi kekuasaan elite. Proses pengambilan keputusan dalam partai sering kali didominasi oleh kepentingan kelompok tertentu yang memiliki kontrol terhadap struktur organisasi dan sumber daya politik. Akibatnya, aspirasi masyarakat di tingkat akar rumput mengalami keterbatasan untuk masuk ke dalam agenda politik partai secara substantif. Kondisi tersebut menyebabkan hubungan antara masyarakat dan partai politik semakin

mengalami jarak karena masyarakat merasa bahwa kepentingan mereka tidak lagi menjadi prioritas utama dalam proses politik nasional.

Menurunnya kualitas representasi politik juga terlihat dari kecenderungan partai politik yang lebih mengutamakan strategi elektoral dibandingkan memperjuangkan kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Aktivitas politik partai sering kali meningkat secara intensif menjelang pemilu, tetapi mengalami penurunan setelah proses elektoral selesai. Situasi ini menunjukkan bahwa hubungan antara partai politik dan masyarakat semakin bersifat pragmatis dan transaksional. Masyarakat diposisikan sebagai basis suara yang diperlukan untuk memenangkan kontestasi politik, bukan sebagai subjek utama dalam proses pengambilan kebijakan negara. Akibatnya, banyak persoalan publik yang tidak memperoleh perhatian serius karena orientasi politik partai lebih diarahkan pada kepentingan menjaga stabilitas kekuasaan dan memperluas pengaruh elite dalam pemerintahan (Suryani et al., 2021).

Dalam kondisi demikian, kualitas demokrasi substantif mengalami penurunan karena proses politik tidak lagi berjalan berdasarkan kebutuhan masyarakat secara luas. Representasi politik yang seharusnya menjadi mekanisme utama dalam memperjuangkan kepentingan publik berubah menjadi alat legitimasi bagi kelompok elite untuk mempertahankan kekuasaan. Fenomena tersebut terlihat dari semakin terbatasnya ruang partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik. Meskipun secara formal masyarakat tetap memiliki hak politik melalui pemilu dan berbagai mekanisme demokrasi lainnya, tetapi pengaruh masyarakat terhadap arah kebijakan negara sering kali sangat terbatas dibandingkan pengaruh elite politik dan kelompok berkepentingan tertentu. Situasi ini menunjukkan bahwa demokrasi mengalami ketimpangan distribusi pengaruh politik yang cukup serius.

Untuk memperjelas berbagai dampak oligarki partai politik terhadap kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan di Indonesia, berikut disajikan beberapa

indikator utama yang menunjukkan bentuk pengaruh oligarki politik dalam praktik ketatanegaraan kontemporer.

Tabel 1. Indikator Dampak Oligarki Partai Politik terhadap Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan di Indonesia

No	Indikator	Bentuk Dampak dalam Sistem Politik	Implikasi terhadap Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
1	Menurunnya kualitas representasi politik masyarakat	Aspirasi masyarakat kurang terakomodasi dalam proses pengambilan kebijakan	Demokrasi menjadi kurang substantif dan cenderung elitis
2	Dominasi kepentingan elite dalam pembentukan kebijakan publik	Kebijakan lebih menguntungkan kelompok tertentu dibanding kepentingan publik	Terjadinya ketimpangan dalam distribusi kebijakan dan sumber daya negara
3	Melemahnya transparansi politik	Proses politik dan pengambilan keputusan berlangsung secara tertutup	Pengawasan publik terhadap kekuasaan menjadi terbatas
4	Menurunnya akuntabilitas partai politik	Elite partai lebih berorientasi pada kepentingan kekuasaan dibanding tanggung jawab publik	Meningkatnya potensi penyalahgunaan kekuasaan
5	Menguatnya politik transaksional	Distribusi jabatan dan dukungan politik dipengaruhi kepentingan pragmatis	Proses demokrasi kehilangan orientasi ideal dan etika politik
6	Menurunnya kepercayaan publik terhadap partai politik	Masyarakat semakin skeptis terhadap institusi politik dan demokrasi	Partisipasi politik masyarakat cenderung melemah
7	Pengaruh oligarki terhadap independensi lembaga negara	Lembaga negara rentan terhadap intervensi kepentingan elite politik	Fungsi pengawasan dan penegakan hukum menjadi tidak optimal
8	Ketergantungan politik terhadap kekuatan modal	Elite ekonomi memiliki pengaruh besar terhadap aktivitas politik partai	Kebijakan publik berpotensi dipengaruhi kepentingan ekonomi tertentu
9	Terbatasnya partisipasi publik dalam proses politik	Masyarakat hanya dilibatkan pada momentum elektoral	Hubungan antara negara dan masyarakat menjadi semakin renggang
10	Menurunnya kualitas demokrasi konstitusional	Demokrasi berjalan secara prosedural tetapi lemah secara substantif	Stabilitas dan legitimasi demokrasi mengalami penurunan

Menguatnya oligarki partai politik juga berdampak besar terhadap proses pembentukan kebijakan publik dalam sistem pemerintahan. Dalam banyak kasus, kebijakan negara tidak sepenuhnya dibentuk berdasarkan kebutuhan objektif masyarakat, tetapi sangat dipengaruhi oleh kompromi politik elite yang memiliki kepentingan terhadap distribusi kekuasaan dan sumber daya ekonomi. Hubungan yang erat antara elite politik dan kelompok

pemilik modal menyebabkan proses legislasi maupun pengambilan kebijakan strategis negara sering kali lebih mengakomodasi kepentingan kelompok tertentu dibandingkan kepentingan masyarakat secara luas. Akibatnya, kebijakan publik cenderung menghasilkan ketimpangan karena lebih menguntungkan pihak-pihak yang memiliki akses kuat terhadap pusat kekuasaan politik.

Pengaruh kepentingan elite terhadap pembentukan kebijakan publik semakin terlihat dalam proses politik yang berlangsung di lembaga legislatif maupun eksekutif. Banyak keputusan strategis negara lahir melalui proses kompromi politik tertutup yang minim partisipasi publik. Dalam situasi tersebut, transparansi pembentukan kebijakan menjadi lemah karena proses politik lebih banyak berlangsung dalam negosiasi elite dibandingkan melalui mekanisme deliberasi yang terbuka. Kondisi ini tidak hanya memengaruhi kualitas kebijakan publik, tetapi juga memperlihatkan adanya dominasi kelompok tertentu dalam menentukan arah pembangunan nasional. Ketika kebijakan negara lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan elite, maka prinsip keadilan sosial dalam demokrasi akan semakin sulit diwujudkan secara nyata.

Selain memengaruhi proses kebijakan publik, oligarki partai politik juga berdampak terhadap melemahnya transparansi dan akuntabilitas politik dalam sistem pemerintahan. Konsentrasi kekuasaan pada kelompok elite tertentu menyebabkan proses pengambilan keputusan politik menjadi semakin tertutup dan sulit diawasi oleh masyarakat. Banyak keputusan strategis partai maupun negara tidak dilakukan secara terbuka, sehingga publik mengalami keterbatasan dalam memperoleh informasi mengenai dasar pertimbangan politik yang digunakan dalam pembentukan kebijakan. Situasi tersebut menciptakan ruang yang cukup besar bagi berkembangnya praktik politik transaksional, penyalahgunaan kekuasaan, hingga korupsi politik yang melibatkan elite partai dan pejabat negara.

Melemahnya transparansi politik juga berkaitan erat dengan persoalan pendanaan partai politik yang sering kali tidak dikelola secara terbuka. Ketergantungan partai terhadap sumber daya ekonomi dari kelompok tertentu menyebabkan aliran dukungan finansial dalam aktivitas politik sulit dipantau secara akuntabel. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai persoalan dalam praktik demokrasi karena hubungan antara kekuatan modal dan kekuasaan politik menjadi semakin sulit dipisahkan. Dalam banyak situasi, dukungan finansial

terhadap partai politik berpotensi memengaruhi arah kebijakan publik maupun distribusi proyek dan sumber daya negara. Akibatnya, praktik politik yang berkembang tidak lagi sepenuhnya berorientasi pada kepentingan publik, tetapi juga dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi kelompok tertentu yang memiliki akses terhadap elite partai politik.

Persoalan akuntabilitas politik semakin kompleks ketika elite partai yang menduduki jabatan publik lebih loyal terhadap kepentingan partai atau kelompok politik tertentu dibandingkan terhadap masyarakat sebagai pemegang kedaulatan. Dalam kondisi demikian, pejabat publik sering kali menghadapi konflik kepentingan antara menjalankan fungsi pelayanan publik dan menjaga kepentingan politik elite partai yang mendukung posisinya. Situasi ini menyebabkan pengawasan terhadap kekuasaan menjadi lemah karena relasi antaraktor politik lebih banyak dibangun berdasarkan kepentingan bersama dalam mempertahankan stabilitas kekuasaan. Akibatnya, mekanisme checks and balances dalam sistem demokrasi tidak berjalan secara optimal.

Dampak lain yang cukup serius dari menguatnya oligarki partai politik adalah menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik dan institusi demokrasi secara keseluruhan. Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat semakin menunjukkan sikap skeptis terhadap praktik politik yang berlangsung dalam sistem demokrasi Indonesia. Berbagai kasus korupsi, konflik kepentingan, politik transaksional, serta lemahnya keberpihakan partai terhadap masyarakat memperkuat persepsi bahwa politik lebih banyak dikuasai oleh elite yang memperjuangkan kepentingannya sendiri. Kondisi ini menyebabkan legitimasi sosial partai politik mengalami penurunan yang cukup signifikan. Masyarakat mulai memandang partai politik bukan lagi sebagai institusi perjuangan publik, melainkan sebagai bagian dari struktur kekuasaan yang sulit dijangkau dan diawasi secara efektif.

Menurunnya kepercayaan publik terhadap partai politik juga berdampak terhadap kualitas partisipasi politik masyarakat. Ketika masyarakat merasa

bahwa suara dan aspirasi mereka tidak memiliki pengaruh nyata terhadap arah kebijakan negara, maka keterlibatan politik cenderung menjadi semakin pasif. Partisipasi dalam pemilu mungkin tetap berlangsung secara formal, tetapi keterikatan masyarakat terhadap proses demokrasi mengalami penurunan secara substantif. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat memunculkan apatisisme politik, meningkatnya ketidakpuasan sosial, serta melemahnya legitimasi pemerintahan demokratis. Demokrasi yang kehilangan kepercayaan publik akan menghadapi kesulitan dalam membangun stabilitas politik yang berkelanjutan karena hubungan antara negara dan masyarakat menjadi semakin renggang.

Pada sisi lain, oligarki partai politik juga memengaruhi independensi lembaga negara dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, partai politik memiliki pengaruh besar terhadap distribusi jabatan publik dan pembentukan struktur kekuasaan negara. Ketika partai politik dikuasai oleh oligarki elite, maka pengaruh tersebut berpotensi masuk ke dalam berbagai lembaga negara, baik di tingkat legislatif, eksekutif, maupun lembaga independen lainnya. Situasi ini menyebabkan independensi lembaga negara sering kali menghadapi tekanan politik dari kepentingan elite partai. Akibatnya, fungsi pengawasan, penegakan hukum, maupun pelayanan publik dapat terganggu karena adanya intervensi kepentingan politik tertentu.

Pengaruh oligarki terhadap independensi lembaga negara juga terlihat dalam proses pengisian jabatan strategis yang sering kali dipengaruhi oleh pertimbangan politik dibandingkan profesionalisme dan integritas. Ketika distribusi jabatan publik lebih banyak ditentukan oleh kompromi elite partai, maka lembaga negara akan mengalami kesulitan dalam menjaga netralitas dan independensinya. Dalam banyak kasus, pejabat publik cenderung memiliki loyalitas politik terhadap kelompok yang mendukung pencalonannya, sehingga keputusan yang diambil berpotensi dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu. Kondisi

tersebut memperlihatkan bahwa oligarki partai politik tidak hanya memengaruhi kehidupan internal partai, tetapi juga berdampak luas terhadap kualitas tata kelola pemerintahan dan supremasi hukum dalam negara demokrasi.

Rekonstruksi Sistem Kepartaian dalam Memperkuat Demokrasi Konstitusional

Perkembangan demokrasi Indonesia dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan bahwa keberlangsungan sistem demokrasi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan pemilu dan mekanisme konstitusional formal, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kualitas sistem kepartaian yang menjadi fondasi utama dalam distribusi kekuasaan politik. Partai politik memiliki posisi yang sangat strategis dalam sistem ketatanegaraan karena menjadi penghubung antara masyarakat dan negara, sekaligus menjadi pintu utama dalam proses pembentukan kepemimpinan nasional maupun daerah. Akan tetapi, berbagai persoalan yang berkembang dalam kehidupan kepartaian Indonesia, seperti menguatnya oligarki internal, pragmatisme politik, lemahnya kaderisasi, dan dominasi kepentingan elite, menunjukkan bahwa sistem kepartaian nasional masih menghadapi tantangan serius dalam mewujudkan demokrasi yang substantif. Dalam kondisi tersebut, rekonstruksi sistem kepartaian menjadi kebutuhan yang semakin mendesak untuk memperkuat demokrasi konstitusional dan mengembalikan fungsi partai politik sebagai institusi representasi publik yang mampu bekerja secara demokratis, terbuka, dan responsif terhadap kepentingan masyarakat.

Rekonstruksi sistem kepartaian tidak dapat dilepaskan dari upaya memperkuat demokrasi internal dalam tubuh partai politik. Selama ini, salah satu persoalan utama yang berkembang dalam partai politik Indonesia adalah tingginya konsentrasi kekuasaan pada kelompok elite tertentu yang mengendalikan arah kebijakan partai secara dominan. Situasi tersebut menyebabkan proses pengambilan keputusan politik sering kali berlangsung secara tertutup dan minim partisipasi kader. Akibatnya, partai politik mengalami kesulitan dalam membangun budaya

organisasi yang demokratis karena struktur kekuasaan internal lebih banyak dipengaruhi oleh loyalitas personal dibandingkan mekanisme kelembagaan yang sehat. Dalam konteks ini, penguatan demokrasi internal menjadi langkah penting untuk menciptakan distribusi kekuasaan yang lebih seimbang dalam organisasi partai, sehingga setiap kader memiliki kesempatan yang lebih adil untuk terlibat dalam proses politik internal.

Penguatan demokrasi internal juga diperlukan untuk mengurangi dominasi figur sentral yang selama ini menjadi salah satu ciri utama kehidupan kepartaian Indonesia. Ketergantungan partai terhadap tokoh tertentu menyebabkan keberlangsungan organisasi politik sering kali sangat bergantung pada kekuatan personal elite partai. Kondisi tersebut tidak hanya mempersempit ruang partisipasi kader lain, tetapi juga menghambat berkembangnya sistem organisasi yang lebih kolektif dan profesional. Oleh karena itu, rekonstruksi sistem kepartaian perlu diarahkan pada pembentukan mekanisme pengambilan keputusan yang lebih terbuka, partisipatif, dan berbasis pada musyawarah organisasi. Dengan demikian, partai politik tidak hanya menjadi kendaraan politik elite tertentu, tetapi benar-benar berkembang sebagai institusi demokrasi yang mampu mengakomodasi berbagai aspirasi internal secara seimbang.

Selain penguatan demokrasi internal, reformasi mekanisme kaderisasi dan rekrutmen politik juga menjadi bagian penting dalam upaya memperbaiki sistem kepartaian nasional. Selama ini, proses kaderisasi dalam banyak partai politik masih menghadapi berbagai persoalan yang berkaitan dengan terbatasnya ruang kompetisi yang sehat. Kesempatan untuk memperoleh posisi strategis dalam partai sering kali lebih dipengaruhi oleh kedekatan dengan elite, kekuatan modal, atau loyalitas politik dibandingkan kapasitas dan kompetensi kader. Situasi tersebut menyebabkan partai politik mengalami kesulitan dalam melahirkan pemimpin yang benar-benar memiliki kualitas kepemimpinan, integritas, dan kemampuan representasi publik yang baik. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut tidak hanya

memengaruhi kualitas partai politik, tetapi juga berdampak terhadap kualitas kepemimpinan nasional yang lahir dari proses politik kepartaian.

Reformasi kaderisasi politik menjadi semakin penting karena partai politik seharusnya berfungsi sebagai ruang pembentukan kepemimpinan publik yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan tantangan ketatanegaraan yang terus berkembang. Dalam konteks tersebut, proses kaderisasi tidak dapat hanya dipahami sebagai upaya mempersiapkan individu untuk memenangkan kontestasi politik, tetapi juga sebagai proses pembentukan kapasitas politik, etika publik, dan komitmen terhadap demokrasi konstitusional. Partai politik perlu membangun sistem kaderisasi yang lebih terbuka dan berbasis merit, sehingga setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang berdasarkan kemampuan dan integritasnya. Dengan demikian, regenerasi politik dapat berlangsung secara lebih sehat dan mampu menghasilkan kepemimpinan yang lebih kompeten serta responsif terhadap kepentingan masyarakat (Hidayatuddin & Jamba, 2024).

Pada sisi lain, rekonstruksi sistem kepartaian juga harus diarahkan pada peningkatan transparansi dalam pengelolaan partai politik. Transparansi menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam memperkuat akuntabilitas partai terhadap masyarakat. Selama ini, banyak persoalan dalam kehidupan kepartaian Indonesia berkaitan dengan lemahnya keterbukaan dalam pengelolaan organisasi, terutama terkait pendanaan politik, proses pengambilan keputusan, dan distribusi kekuasaan internal. Kondisi tersebut menciptakan ruang yang cukup besar bagi berkembangnya praktik politik transaksional dan penyalahgunaan kekuasaan. Ketika masyarakat tidak memiliki akses yang memadai untuk mengetahui bagaimana partai politik dikelola, maka tingkat kepercayaan publik terhadap institusi politik akan terus mengalami penurunan.

Peningkatan transparansi pengelolaan partai politik juga penting untuk mengurangi dominasi kepentingan elite

ekonomi dalam aktivitas politik. Ketergantungan partai terhadap dukungan finansial dari kelompok tertentu sering kali memengaruhi independensi partai dalam menentukan kebijakan politik maupun strategi organisasi. Oleh karena itu, sistem pendanaan politik perlu dikelola secara lebih terbuka dan akuntabel agar masyarakat dapat mengetahui sumber serta penggunaan dana politik secara jelas. Transparansi dalam pengelolaan partai tidak hanya berkaitan dengan persoalan administratif, tetapi juga menyangkut upaya membangun integritas politik dan memperkuat legitimasi demokrasi. Ketika partai politik mampu menunjukkan keterbukaan dalam aktivitas organisasinya, maka hubungan antara masyarakat dan partai akan berkembang secara lebih sehat dan demokratis.

Rekonstruksi sistem kepartaian juga membutuhkan penguatan partisipasi masyarakat dalam proses politik. Selama ini, hubungan antara partai politik dan masyarakat sering kali bersifat temporer dan berorientasi pada kepentingan elektoral semata. Aktivitas partai cenderung meningkat ketika mendekati pemilu, tetapi menurun setelah kontestasi politik selesai. Situasi tersebut menyebabkan masyarakat tidak memiliki ruang yang cukup luas untuk terlibat secara berkelanjutan dalam proses politik. Dalam demokrasi konstitusional, partisipasi masyarakat tidak seharusnya dibatasi hanya pada pemberian suara dalam pemilu, tetapi juga harus mencakup keterlibatan dalam pengawasan kebijakan publik, penyampaian aspirasi politik, dan proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan masyarakat secara luas.

Penguatan partisipasi masyarakat menjadi sangat penting karena demokrasi yang sehat membutuhkan hubungan yang kuat antara partai politik dan masyarakat sipil. Partai politik perlu membangun pola komunikasi politik yang lebih terbuka, dialogis, dan berkelanjutan agar masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai objek mobilisasi politik, tetapi juga sebagai bagian aktif dalam proses demokrasi. Dalam konteks ini, partai politik harus mampu memperluas ruang partisipasi publik melalui berbagai mekanisme yang

memungkinkan masyarakat terlibat dalam penyusunan agenda politik maupun pengawasan terhadap aktivitas partai. Dengan demikian, demokrasi tidak hanya berjalan secara prosedural, tetapi juga berkembang sebagai sistem politik yang benar-benar mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari upaya rekonstruksi sistem kepartaian yang lebih partisipatif. Ruang digital memberikan peluang yang cukup besar bagi masyarakat untuk terlibat dalam diskusi politik, menyampaikan kritik, dan mengawasi aktivitas partai politik secara lebih luas. Akan tetapi, pemanfaatan teknologi tersebut harus diarahkan pada penguatan kualitas demokrasi, bukan sekadar alat pencitraan politik. Partai politik perlu membangun komunikasi publik yang lebih substantif dan tidak hanya berorientasi pada popularitas sesaat. Dengan demikian, ruang digital dapat menjadi sarana yang efektif untuk memperkuat hubungan antara masyarakat dan partai politik dalam sistem demokrasi modern.

Seluruh upaya rekonstruksi tersebut diarahkan untuk membangun sistem kepartaian yang lebih responsif dan representatif dalam kerangka demokrasi konstitusional. Sistem kepartaian yang sehat tidak hanya ditandai oleh banyaknya jumlah partai politik atau tingginya kompetisi elektoral, tetapi juga ditentukan oleh kemampuan partai dalam menjalankan fungsi representasi secara adil, terbuka, dan bertanggung jawab. Partai politik harus mampu menempatkan kepentingan masyarakat sebagai orientasi utama dalam aktivitas politiknya, bukan sekadar menjadikan kekuasaan sebagai tujuan akhir dari perjuangan politik. Dalam konteks tersebut, rekonstruksi sistem kepartaian menjadi bagian penting dalam memperkuat kualitas demokrasi Indonesia yang selama ini masih menghadapi berbagai persoalan struktural terkait oligarki, pragmatisme politik, dan lemahnya akuntabilitas kekuasaan.

Sistem kepartaian yang lebih responsif juga membutuhkan perubahan budaya politik yang lebih demokratis dalam hubungan antara elite partai dan

masyarakat. Politik tidak dapat terus dijalankan dalam pola eksklusif yang hanya menguntungkan kelompok tertentu, karena kondisi tersebut akan semakin memperbesar jarak antara negara dan masyarakat. Demokrasi konstitusional hanya dapat berkembang secara sehat ketika partai politik mampu menjalankan fungsi representasi publik secara konsisten serta membuka ruang partisipasi politik yang lebih luas dan inklusif. Oleh karena itu, rekonstruksi sistem kepartaian tidak hanya menjadi persoalan organisasi politik semata, tetapi juga berkaitan dengan upaya memperkuat kualitas demokrasi, supremasi hukum, dan tata kelola pemerintahan yang lebih adil dalam sistem ketatanegaraan Indonesia kontemporer.

KESIMPULAN

Transformasi partai politik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menunjukkan adanya pergeseran orientasi politik yang cukup signifikan dari fungsi representasi demokratis menuju kecenderungan oligarki kekuasaan. Partai politik yang pada awal reformasi diharapkan menjadi sarana perjuangan aspirasi masyarakat dan penguatan demokrasi justru mengalami perubahan orientasi yang semakin berfokus pada konsolidasi kekuasaan politik. Kondisi tersebut terlihat dari menguatnya dominasi elite dalam pengambilan keputusan partai, berkembangnya pragmatisme politik dalam pola koalisi dan oposisi, serta semakin dominannya kepentingan elektoral dalam aktivitas politik partai. Pada saat yang sama, hubungan antara partai politik dan masyarakat juga mengalami perubahan yang cukup mendasar, di mana masyarakat sering kali hanya diposisikan sebagai basis dukungan politik dalam momentum elektoral tanpa keterlibatan substantif dalam proses pengambilan kebijakan publik. Menguatnya oligarki dalam internal partai politik turut memberikan dampak yang luas terhadap kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan di Indonesia. Konsentrasi kekuasaan pada kelompok elite tertentu menyebabkan menurunnya kualitas representasi politik masyarakat, melemahnya transparansi dan akuntabilitas politik, serta meningkatnya pengaruh kepentingan elite terhadap pembentukan

kebijakan publik. Selain itu, ketergantungan partai politik terhadap kekuatan modal dan jaringan kekuasaan juga mempersempit ruang kaderisasi politik yang kompetitif dan berpotensi memengaruhi independensi lembaga negara dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya. Situasi tersebut pada akhirnya berdampak terhadap menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik dan institusi demokrasi secara keseluruhan, sehingga demokrasi yang berjalan secara prosedural belum sepenuhnya mampu menghadirkan demokrasi substantif yang berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Oleh karena itu, rekonstruksi sistem kepartaian menjadi langkah yang penting dalam memperkuat demokrasi konstitusional di Indonesia. Upaya tersebut perlu diarahkan pada penguatan demokrasi internal partai, reformasi mekanisme kaderisasi dan rekrutmen politik, peningkatan transparansi pengelolaan partai politik, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam proses politik. Melalui sistem kepartaian yang lebih terbuka, responsif, dan representatif, partai politik diharapkan mampu kembali menjalankan fungsi utamanya sebagai institusi demokrasi yang memperjuangkan kepentingan publik dan menjaga keseimbangan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- As'ad, M. U., Barsihanor, B., Sobirin, S., & Hergianasari, P. (2023). Oligarki dan jaringan patronase: dinamika kebijakan pertambangan batu bara di Kabupaten Tanah Bumbu. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 14(1), 1-17.
- Basarah, B., & Hasanah, U. (2024). Politik Hukum dalam Reformasi Regulasi di Indonesia: (Antara Kepentingan Politik dan Kepentingan Elit). *Riau Law Journal*, 8(2), 148-161.
- Basuki, U. (2020). Parpol, Pemilu dan Demokrasi: Dinamika Partai Politik dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Demokrasi. *Kosmik Hukum*, 20(2), 81-94.
- Boestam, A. B., Prakosa, A., & Avianto, B. N. (2023). Upaya partai politik dalam memanfaatkan demokrasi virtual di era

- digital. *Jurnal Pustaka Komunikasi*, 6(1), 1-17.
- Bolqiah, L. H., & Raffiudin, R. (2020). Dominasi oligarki dan ketidakhadiran partai politik hijau di Indonesia. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 19(2), 151-167.
- Budi, K. (2024). Oligarki dalam Demokrasi serta Prakteknya dalam Politik Hukum Indonesia. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(4), 1267-1274.
- Cahyono, A., Teguh, T., & Khamami, A. R. (2024). Konvergensi Politik Islam: Perilaku Elektoral Warga Nu Trenggalek Terhadap PKS Dan Dampaknya Bagi Peta Politik Lokal. *Benchmarking*, 8(2), 263-276.
- Elviandri, E., Dana, R., Kholik, S., & Noor, A. (2024). Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik: Pilar Demokrasi Dan Penguatan Pelembagaan Parpol Dari Conflict of Interest dan Abuse of Power. *Jurnal Retentum*, 6(2), 192-201.
- Erinaldi, E. (2024). Politik identitas dan konsolidasi demokrasi di Indonesia pasca-reformasi. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 21(2), 1-13.
- Fadilah, S., & Sejati, S. P. (2024). Generasi Perintis dan Penerus Studi Teori Kepartaian. *JOSH: Journal of Sharia*, 3(02), 152-169.
- Fajri, P. C. (2023). Dinamika Politik Ketatanegaraan Indonesia pada Masa Demokrasi Parlementer (1950-1959). *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam*, 3(2), 241-258.
- Hasan, R. (2024). Dinamika konsep welfare state di Indonesia: Antara janji konstitusi dan kenyataan ekonomi. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(10).
- Hidayatuddin, H., & Jamba, P. (2024). Peran Partai Politik Terhadap Pembentukan Kebijakan Publik. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(6), 9045-9057.
- Muthahhari, M., & Sahrin, A. (2024). Masa Depan Partai Politik Islam di Kota Medan: (Dinamika Koalisi Dalam Pilkada Medan 2024). *Al Mabhats: Jurnal Penelitian Sosial Agama*, 9(2), 123-136.
- Nugroho, M. B. A., & Hosnah, A. U. (2024). Problematika Oligarki Dalam Partai Politik Yang Memicu Lahirnya Tindak Pidana Korupsi. *Palar (Pakuan Law Review)*, 10(2), 31-42.
- Rais, M. T. R. (2022). Negara hukum Indonesia: Gagasan dan penerapannya. *Jurnal Hukum Unsulbar*, 5(2), 11-31.
- Rohmah, E. (2024). Perubahan paradigma politik di Indonesia dari demokrasi ke oligarki. *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, 16(1), 01-12.
- Saputra, M. R., Setiadi, W., & Thohari, A. A. (2024). Analisis potensi implementasi sistem politik tanpa partai di Indonesia dan dampaknya terhadap demokrasi dan tata kelola pemerintahan. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(4), 204-222.
- Sofianus, T., Aruni, F., Angreni, D. K. D., & Kamaly, N. (2023). Dimensi Politik Dalam Formulasi Kebijakan: Studi Pemekaran Kecamatan Kandang Makmur Wilayah Kota Lhokseumawe. *Journal of Governance and Social Policy*, 4(1), 44-63.
- Sugeng, S. (2023). Gagasan Pembatasan Kekuasaan Dan Pengendalian Oligarki. *Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal*, 5(1), 70-84.
- Sulistiono, S., & Boediningsih, W. (2023). Konsep Kedaulatan Rakyat dalam Implementasi Presidential Threshold Pada Sistem Pemilihan Umum Secara Langsung di Indonesia. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(3), 333-345.
- Suryani, D., Izzati, F. F., Syafi'i, I., Adaba, P. Y., & Satriani, S. (2021). Kemunduran demokrasi tata kelola SDA: Penguatan oligarki dan pelemahan partisipasi civil society. *Jurnal Penelitian Politik*, 18(2), 173-189.
- Suryatni, L. (2024). Pancasila Sebagai Basis Moralitas Haluan Kebangsaan Dan Kenegaraan Dalam Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Berdasarkan Bhineka Tunggal Ika. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 14(2).
- Susilawati, Y. (2023). Penguatan Fungsi Partai Politik Sebagai Pencegahan Polarisasi Partai Politik Pada Masa Pemilu 2024. *As-Syifa: Journal of Islamic Studies and History*, 2(2), 110-123.
- Wungu, D. A. N. (2022). Modal Sosial dalam Keterpilihan Perempuan Calon

- Gubernur: Studi Kasus Karolin Margret Natassa di Kalimantan Barat dan Khofifah Indar Parawansa di Jawa Timur pada Pilkada Serentak 2018. *Journal of Politics and Policy*, 4(1), 15-31.
- Wutsqah, U., & Erham, E. (2024). Diskursus Pembatasan Kekuasaan di Indonesia dalam Perspektif Konstitusi dan Konstitusionalisme. *Jurnal Citizenship Virtues*, 4(2), 771-784.